

PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH

(STUDI : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PILKADA 2020)

Ida Bagus Wahyu Widia Putra¹, Piers Andreas Noak², Kadek Dwita Apriani³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : wahyuwidia1999@gmail.com¹, piersandreasnoak@unud.ac.id², kadek.dwita88@unud.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the considerations of political parties in determining candidates for regional heads in the 2020 simultaneous elections. The Rational Choice Theory by Barbara Geddes is used as an analytical knife to dissect the considerations of the PDI-P in selecting candidates for regional heads and deputy regional heads in the 2020 simultaneous elections. the dominant party theory put forward by Giovanni Sartori is also used as an analytical knife to dissect the existence of Party Domination carried out by PDI-P with a regional basis strategy. By using qualitative methods through interviews, the results of the research are as follows: the election of Kadek Agus Arya Wibawa as a Candidate for Deputy Mayor cannot be separated from regional factors, where the Candidate for Mayor comes from the East Denpasar District and the Deputy Mayor Candidate comes from the South Denpasar District. The unification of votes from these two sub-districts formed the dominant party in Denpasar. Apart from that, Kadek Agus' enormous mass support certainly gave PDI-P its own advantages, both in terms of existence and increasing party mass.

Keywords: Consideration, Regional, Mass base, PDI-P, Simultaneous Pilkada 2020

1. PENDAHULUAN

Pilkada adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi pada tingkat daerah. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan untuk rakyat maka sudah sepantasnya yang menjadi pemerintah haruslah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan produk dibukanya jalan reformasi yakni dengan dibuatnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta diperkuat lagi melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan bagi pasangan calon melalui perseorangan (Erdiansyah, 2018). Pemilukada yang dilaksanakan merupakan tujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat memilih pemimpin daerahnya secara langsung dengan semangat demokrasi.

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada ini juga memiliki sistem yang sama dengan pemilu, yaitu Pasangan Calon (Paslon) akan dipilih oleh rakyat. Paslon sendiri merupakan orang-orang atau kader terbaik yang diusung oleh Partai Politik. Biasanya Partai akan

memilih orang-orang yang berkompeten dan memiliki pengaruh disuatu wilayah agar kepercayaan masyarakat mudah dibangun. Pada masa-masa kampanye masing-masing calon akan menjalankan berbagai macam strategi guna untuk mendapatkan posisi jabatan tertinggi. Para calon akan menggunakan strategi politik untuk menarik hati rakyat yang dimana memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya dalam hal ini Partai Politik ikut berperan untuk membantu pasangan calon yang diusungnya.

Pada tahun 2020 Indonesia melaksanakan Pilkada serentak di beberapa daerah salah satunya Bali. Di Bali sendiri diadakan pilkada pada 6 daerah yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem dan juga Denpasar (NusaBali.com, 2020). Kota Denpasar menjadi salah satu daerah yang mengadakan Pilkada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota yang sekarang disebut dengan Pemilihan Walikota (Pilwali). Dengan adanya Pilkada ini tentunya setiap Partai Politik mulai memilih dan mengusung orang-orang yang berkompeten untuk menjadi Calon Kepala Daerah khususnya Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Denpasar.

Pada Pilwali kali ini salah satu partai yaitu PDI-P mengusung beberapa calon yang berkompeten dan sudah diakui kinerjanya oleh masyarakat. PDI-P mengusung I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Calon Walikota yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Denpasar menemani

Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sebagai Walikota Denpasar selama 2 periode selain itu beliau juga menjabat sebagai sekretaris DPD PDI-P Bali. I Gusti Ngurah Jaya Negara dianggap sangatlah pantas oleh partai pada posisi Calon Walikota dikarenakan sudah berpengalaman sebagai Wakil Walikota selama 2 periode. sementara untuk Calon Wakil Walikota terdapat dua nama pada saat itu yakni I Gusti Ngurah Gede yang merupakan ketua DPC PDI-P Kota Denpasar yang berasal dari Puri Pemayun Kesiman dan Kadek Agus Arya Wibawa yang merupakan kader muda terbaik yang dimiliki PDI-P dan menjabat sebagai sekretaris DPC PDI-P Kota Denpasar.

Kedua orang tersebut merupakan kader-kader terbaik yang sudah tidak diragukan lagi kinerja maupun prestasi yang diraih, akan tetapi keduanya bersaing dalam memperebutkan rekomendasi sebagai Calon Wakil Walikota mendampingi I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam Pilwali 2020. Pada tanggal 28 agustus 2020, surat rekomendasi telah dikeluarkan oleh pusat PDI-P dan hasilnya adalah Kadek Agus Arya Wibawa terpilih sebagai Calon Wakil Walikota mendampingi I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Calon Walikota.

PDI-P sebagai partai yang mendominasi khususnya di Bali saat ini memiliki kader yang sangat banyak dan talenta yang sangat baik, namun belum tentu memiliki figur yang tepat untuk diusung sebagai calon oleh PDI-P. hal ini dapat dilihat

dengan adanya 2 kader yang bersaing memperebutkan posisi Calon Wakil Walikota dalam pilwali 2020. Terlihat juga bahwa 2 kader ini sama-sama memiliki keunggulan dari segi latar belakang mereka masing-masing. Hal ini disebabkan karena Kadek Agus Arya Wibawa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh I Gusti Ngurah Gede.

Bertitik tolak dari permaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan PDI-P dalam penentuan Calon Wakil Walikota Denpasar pada Pilkada serentak 2020. Kota Denpasar dipilih menjadi tempat penelitian bukan karena tanpa alasan, mengingat daerah politik dari calon merupakan daerah kota yang identik dengan situasi maju baik secara pola pikir maupun gaya hidup. Penulis juga berfokus pada pemilihan Calon Wakil Walikota dikarenakan adanya dua nama kader yang sempat memperebutkan posisi Calon Wakil Walikota. Tentunya hal ini akan menarik untuk diteliti berdasarkan bagaimana pertimbangan PDI-P dalam menentukan kader yang akan diusung sebagai Calon Wakil Walikota pada Pilkada serentak 2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai referensi dalam penyusunan hasil penelitian ini. Kajian pustaka terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian pertama yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini adalah

Penelitian dari Fauziah Badriyani (2018) yang berjudul Analisis pertimbangan partai politik dalam penentuan bakal Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi). Dijelaskan bahwa banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dari partai politik dalam memilih calon yang akan diusung dalam sebuah pemilihan baik dari segi figur, maupun kualitas diri dari orang yang akan dicalonkan. Diterangkan juga dalam tulisan ini bahwa dari pihak partai PAN sendiri menegaskan bahwa profesi yang cukup dipertimbangkan adalah seorang akademisi dan agamawan, yang dimana sudah terbukti memiliki kualitas sebagai pemimpin daerah yang baik menurut pihak partai PAN.

Kajian kedua adalah penelitian dari Imron Rozali (2016) berjudul kepala daerah oleh partai politik (studi: penetapan Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie sebagai calon Walikota Kota Tangerang selatan periode 2015-2020 oleh DPD Partai Nasdem). Dijelaskan bahwa pada saat proses seleksi bakal calon, proses ini dilakukan oleh tim Pemilukada DPD partai NasDem Kota Tangerang dan tentunya bakal calon yang akan dipilih memiliki potensial di berbagai bidang seperti Figur, dan wilayah basis masa.

Kajian ketiga adalah Penelitian mengenai pola rekrutmen partai politik dalam pemilihan Calon Legislative oleh Dede Sibagariang (2019) dengan judul Pola Rekrutmen PDI-P, Nasdem dan Psi dalam

pemilihan Caleg DPRD di Kota Denpasar. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola rekrutment dalam setiap partai tentunya berbeda-beda, tergantung dari keadaan partai tersebut dan juga tergantung terhadap sumber daya atau skill dari individu yang akan diundang. Selain itu penelitian ini menggunakan Teori Rational Choice dalam mengupas penelitian ini

Kajian keempat merupakan tesis yang menggunakan teori Partai Dominan Giovanni Sartori yang dilakukan oleh Irvan Ansyari (2019) dengan judul penelitian yakni Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi. Dalam penelitian ini diketahui adanya afiliasi elit formal dan elit non formal dengan Partai Golkar menjadi indikasi awal bahwa elit berperan dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar.

Teori Rational Choice

Individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik, sebagai makhluk rasional tentunya selalu mempunyai tujuan-tujuan (*goal-seeking* atau *goal-oriented*) yang mencerminkan kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya (*resource restraint*), dan karena itu ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien setiap orang harus memilih antara beberapa alternatif dan menentukan alternatif mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang maksimal baginya. Pelaku *Rational Choice* terutama politisi, birokrat,

pemilih (dalam berbagai acara pemilihan) dan aktor ekonomi, pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan kecenderungan ini. Mereka selalu mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori *Rational Choice*.

Adapun teori *Rational Choice* sempat dikembangkan oleh Barbara Geddes (1996 :78-79), yang mengklarifikasi rekrutmen menjadi empat model dalam buku *Politician's Dilemma*, adalah sebagai berikut :

(1) *Partisanship*, yakni rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi.

(2) *Meritocratic*, yakni rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli.

(3) *Survival*, rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.

(4) *Compartmentalization*, yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada kemampuan dan loyalitas seseorang bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis. Pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal.

Teori Partai Dominan

Dalam definisi terkenal Sartori (2005: 44), pihak yang dominan secara efektif menentukan 'sistem interaksi yang dihasilkan dari persaingan antar partai', sehingga menciptakan sistem kepartaian yang dominan. Giovanni Sartori juga menyatakan bahwa partai dominan berkaitan dengan pemimpin pemerintahan yang artinya bahwa partai dominan harus mengontrol pemerintahan baik itu legislatif (parlemen) maupun eksekutif (presiden/kepala daerah).

Secara umum partai dominan adalah sistem kepartaian yang dipilih secara demokratis dan didalamnya terdapat lebih dari satu partai, namun hanya didominasi oleh satu partai. Partai ini secara terus menerus mendapatkan legitimasi tinggi yang terlihat melalui perolehan suara dan berkuasa di pemerintahan, meskipun partai lain memperoleh kesempatan sama untuk berkuasa.

Partai ini biasanya merupakan partai lama yang muncul bersamaan dengan kemunculan negara, dan partai lainnya muncul beberapa dekade kemudian setelah kehidupan politik berjalan cukup mapan di negara tersebut. Hasilnya adalah partai tersebut sudah berakar sangat kuat di tengah masyarakat dengan organisasi sudah melembaga.

Konsep Pilkada

Peranan Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah sangatlah

besar, khususnya tugas-tugas otonomi. Oleh karena itu, maka berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat bergantung pada Kepala Daerah sebagai manajer daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang pejabat dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Sehingga kualitas menjadi salah satu syarat penting untuk memiliki jabatan khususnya sebagai kepala daerah.

Pemerintah Daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Walikota dan Wakilnya disebut Wakil Bupati/ Wakil Walikota.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan salah satu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokrasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.

Pilkada merupakan salah satu momen penting bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya

antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses pilkada secara langsung dan hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilisasi.

Begitu pentingnya pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan yang mana negara hukum di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi ialah ditangan rakyat bukan negara atau pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan bagaimana pertimbangan bagi PDI-P dalam penentuan Calon Wakil Walikota Denpasar dalam Pilkada serentak 2020.

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan secara langsung melalui wawancara dan pengamatan secara langsung tanpa perantara. Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dari studi kepustakaan yaitu dari dokumen baik literatur, laporan, arsip, data dari penelitian terdahulu dan berbagai data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dimana informan penelitian ini

berasal dari DPC PDI-P Kota Denpasar yang terlibat dalam pengusulan nama calon, dan juga Partai Gerindra sebagai partai koalisi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Creswell (2007). Adapun teknik analisis data tersebut terdiri dari: Pengelolaan data, Membaca dan memoring, menggambarkan, mengklasifikasikan, interpretasi, dan representasi (Creswell, 2007).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pilkada Serentak 2020

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2020 Pilkada dilakukan serentak di masing-masing daerah di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini memiliki karakteristik tantangan tersendiri yang dimana untuk pertama kalinya bagi sejarah kepemiluan di Indonesia, Pemilihan di selenggarakan di tengah pandemi Covid 19. Dengan pertimbangan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP) sepakat bahwa Pilkada Serentak 2020 digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini merupakan keputusan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Bawaslu RI, KPU RI serta DKPP RI.

Pada Pilkada serentak 2020 ini dilaksanakan pada 270 daerah di Indonesia dan 9 diantaranya merupakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Di Bali sendiri, Pilkada dilaksanakan pada 6 kabupaten/kota, yakni Karangasem, Jembrana, Badung, Bangli, Tabanan dan Denpasar. Di Kota Denpasar dilaksanakan Pilkada untuk memilih calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang pada saat itu terdapat 2 pasang calon yakni I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa sebagai pasangan calon dengan nomor urut 1 yang diusung oleh PDI-P, Gerindra, PSI, dan Hanura. Kemudian ada Gede Ngurah Ambara Putra yang berpasangan dengan Made Bagus Kertanegara sebagai pasangan calon nomor urut 2 yang diusung oleh gabungan partai, yakni Partai Golkar, Demokrat, dan Nasdem.

Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) merupakan salah satu Partai Politik yang berasal dari Indonesia. Sejarah PDI berawal

dari penggabungan dari 5 partai politik, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. penggabungan lima partai politik berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI perjuangan. Seiring perjalanannya, PDI terus membongkar pasang dalam struktur pimpinan.

Memasuki era Reformasi, partai yang dipimpin Megawati kembali menguat di Bali dan tak pernah kalah sejak Pemilu 1999. Tahun itu, perolehan suara PDIP di Bali mencapai 1.500.050 suara dengan jatah 7 kursi di DPR. Partai Golkar di urutan kedua hanya meraih 196.984 suara dengan 1 kursi, dan PKB yang berada di urutan ketiga hanya meraih 32.253 suara dengan 1 kursi.

Di Bali sendiri Puri Satria terkenal akan kesetiiaannya kepada PDI-P. Hal ini dapat terlihat dari beberapa figur puri yang terjun ke partai politik seperti, A.A. Ngurah Oka Ratmadi yang pernah menduduki beberapa jabatan penting dalam politik, lalu ada A.A. Gde Ngurah Puspayoga yang juga menduduki beberapa jabatan penting dalam politik dan mereka bisa dikatakan memiliki karir yang cemerlang dalam politik dan mereka merupakan fungsionaris dari partai PDI-P. dengan adanya hubungan yang baik antara puri dan panjak mengakibatkan terbentuknya basis massa puri yang mendukung partai dalam pemilihan.

Hasil Temuan Penelitian

Proses Alur Pencalonan

Pada tahapan awal dalam penentuan calon yang akan diusung, PDI-P akan menerbitkan Juklakjuknis (petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis) yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan teknis tata cara pemilihan Calon Kepala Daerah dari PDI-P. hal ini yang menjadi acuan dalam proses pemilihan calon karena menyangkut berbagai hal seperti waktu pelaksanaan musyawarah dan waktu pengiriman hasil musyawarah di tingkat daerah dalam bentuk surat ke DPP PDI-P.

Pada saat ini PDI-P dalam menentukan pasangan calon menggunakan alur bottom up yang dimana segala proses penentuan ini dilakukan mulai dari bawah ke atas. Pada tahapan ini PDI-P memulai proses dari pengamatan dimasyarakat. Hal ini dilakukan untuk melihat tanggapan ataupun berita mengenai sosok atau figur yang sedang menonjol pada saat itu. Setelah memperoleh data tersebut tindak lanjutnya dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah – musyawarah dari tingkat paling bawah yakni musyawarah ranting yang merupakan struktur PDI-P pada tingkat desa atau kelurahan. Setelah itu hasil musyawarah dari ranting akan dibawa ketingkat kecamatan yang dimana distrukturi oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI-P. kemudian dibawa naik ketingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Denpasar. Pada proses ini tahapannya adalah pengusulan dan

memutuskan nama-nama yang akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Bali. Yang kemudian akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P yang bertempat di Jakarta.

Setelah surat hasil musyawarah dikirim ke Pusat, DPP akan melaksanakan rapat yang dinamakan dengan rapat khusus karena rapat yang dilaksanakan khusus untuk meminta surat rekomendasi. DPP melakukan berbagai langkah-langkah dalam menentukan calon yang akan diusung seperti menguji elektabilitas calon dalam bentuk survey internal DPP. Setelah itu DPP akan mengeluarkan rekomendasi atas beberapa hal yakni pertama melalui hasil proses penyaringan yang benar, yang kedua mempunyai elektabilitas di masyarakat untuk layak dicalonkan, yang ketiga mampu menjaga soliditas partai, yang keempat mempunyai data sebaran jaringan politik di wilayah tersebut. sehingga hanya DPP yang memiliki hak untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang nantinya dikirim ke daerah dan di tanda tangani oleh ketua DPP PDI-P yakni Ibu Prof. Dr. (H.C.) Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri.

Surat musyawarah yang sebelumnya telah dikirim oleh DPD Provinsi Bali telah menghasilkan surat rekomendasi, yang pada tanggal 28 agustus 2020 dikeluarkan oleh DPP PDI-P dan hasilnya adalah Kadek Agus Arya Wibawa terpilih sebagai Calon Wakil Walikota mendampingi I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Calon Walikota.

Pertimbangan PDI-P Dalam Pemilihan Calon

Pada Pilkada Kota Denpasar PDI-P mengusung pasangan calon I Gusti Ngurah Jaya Negara dan kadek Agus Arya Wibawa. Tentunya penentuan nama calon ini tidak semata-mata dipilih secara asal melainkan banyak pertimbangan sehinggal kedua nama tersebut terpilih sebagai kepala daerah. Terpilihnya I Gusti Ngurah Jaya Negara tentunya tidak luput dari jabatan beliau sebelumnya yakni sebagai Wakil Walikota yang dimana masyarakat tentunya mengetahui profil maupun kinerja dari I Gusti Ngurah Jaya Negara sehingga adanya peluang untuk memperoleh suara untuk menang.

Sedangkan terpilihnya Kadek Agus Arya Wibawa memiliki banyak pertimbangan hal ini dikarenakan pada saat pengajuan, I Gusti Ngurah Gede juga di usulkan pada saat musyawarah. Sehingga tentunya tidak mudah bagi PDI-P memilih karena kedua kader tersebut memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai Calon Wakil Walikota. PDI-P tentunya memiliki beberapa syarat dan pertimbangan sehingga Kadek Agus yang terpilih sebagai Calon Wakil Walikota, hal pertama yang dilihat adalah merupakan kader partai yang dimana sebagian besar Partai Politik juga memberikan syarat tersebut untuk mengusung calon, dan Kadek Agus merupakan Kader PDI-P yang sekarang menjabat sebagai sekretaris DPC PDI-P Kota Denpasar.

Hal kedua yang menjadi faktor Pendukung terpilihnya Kadek Agus merupakan massa yang banyak. Kadek Agus sempat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Denpasar sebanyak empat kali, dan juga pada Pemilu 2019 memperoleh suara terbanyak di kecamatan Denpasar selatan yakni dengan jumlah 9.510 suara. Hal ini tentunya membuktikan basis massa yang dimiliki Kadek Agus sangatlah besar khususnya untuk di Denpasar. Selain itu hal ini juga menguntungkan pihak partai karena meningkatnya jumlah partisan yang mendukung PDI-P.

Hal ketiga yang menjadi faktor terpilihnya Dek Agus adalah mengenai basis kewilayahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Denpasar merupakan kota yang memiliki banyak warna partai, dan dari pihak PDI-P sendiri memberanikan diri untuk mengusung pasangan calon dari Partai yang sama. Hal ini tentunya memerlukan strategi yang matang guna memenangkan Pilkada tersebut. merupakan pilihan yang tepat dan bijak untuk memilih Kadek Agus yang basis massanya di Kecamatan Denpasar Selatan. sedangkan I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Gusti Ngurah Gede berbasis masa di Kecamatan Denpasar Timur yang dimana akan mengalami kendala untuk memperoleh suara khususnya di Denpasar yang memiliki 4 Kecamatan.

Hasil Analisis Dengan Teori *Rational Choice*

Hasil dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan Teori *Rational Choice* Barbara Geddes (1996) dalam buku yang berjudul *Politician's Dilemma*. Rational choice menurut Barbara Geddes (1996) menjelaskan mengenai bagaimana setiap individu memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing dan hal tersebut dilakukan dengan keterbatasan dari segi sumber daya sehingga perlunya membuat pilihan yang dimana memberikan keuntungan bagi individu tersebut. Barbara Geddes sendiri mengklarifikasi rekrutmen menjadi empat model yakni *Partisanship*, *Meritocratic*, *Survival*, *Compartmentalization* (Barbara Geddes, 1996 :78-79). Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pertimbangan dari PDI-P dalam menentukan Calon Wakil Walikota sehingga pihak partai memperoleh keuntungan.

Berdasarkan analisis dengan Teori *Rational Choice*, pola rekrutmen dalam penentuan Calon Wakil ini mengacu pada *partisanship* yang dimana pada akhirnya faktor terpilihnya Kadek Agus Arya Wibawa adalah loyalitas dan massa yang dimiliki oleh Kadek Agus Arya Wibawa. Pertimbangan ini tentunya dipikirkan oleh PDI-P karena selain untuk memperoleh kemenangan pada Pilwali 2020 tentunya juga ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh partai. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah massa yang dimiliki oleh Kadek Agus tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi PDI-P. hal ini sesuai dengan konsep *Partisanship* yang

menjelaskan mengenai rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. jika dibandingkan dengan I Gusti Ngurah Gede yang dimana basis masanya tidak sebesar Kadek Agus, hal ini dapat terlihat pada Pemilu 2019 yang pada saat itu I Gusti Ngurah Gede hanya memperoleh suara sebesar 7.066 suara. Ditambah dengan adanya Ormas Bantas menjadikan PDI-P secara tidak langsung memiliki Organisasi non partai yang berada dibawah kendali PDI-P. selain itu dengan faktor umur yang masih muda tentu menjadi salah satu faktor penentu terpilihnya Kadek Agus dikarenakan pada saat ini keterlibatan generasi muda sangatlah diutamakan dalam berbagai aspek untuk memajukan negara.

Hasil Analisis dengan Teori Partai Dominan

Teori Partai Dominan dari Giovanni Sartori (2005) dalam bukunya yang berjudul *parties and party systems a framework for analysis* digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori Partai Dominan digunakan untuk menganalisis wilayah basis massa. Yang dimaksud wilayah basis massa dalam penelitian ini adalah pertimbangan PDI-P dalam penentuan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilatar belakangi faktor kewilayahan.

Diketahui bahwa PDI-P mengusung I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa pada Pilwali 2020. Tentunya ini

menjadi gabungan yang bagus bagi PDI-P karena kedua pasangan calon tersebut berasal dari kecamatan yang berbeda. I Gusti Ngurah Jaya Negara berasal dari kecamatan Denpasar Timur sedangkan Kadek Agus merupakan kader yang berasal dari Kecamatan Denpasar selatan. Hal ini menjadikan PDI-P mendominasi pada 2 kecamatan tersebut dengan basis massa yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan mengusung I Gusti Ngurah Gede sebagai Calon Wakil Walikota yang memiliki basis sama dengan I Gusti Jaya Negara yakni di Denpasar Timur tentunya peluang akan sangat mengecil untuk memperoleh suara kemenangan. Pasangan calon yang berasal dari daerah yang sama akan begitu sulit untuk mendominasi khususnya di Denpasar.

Sebuah keputusan yang tepat bagi PDI-P dikarenakan basis Kadek Agus Arya Wibawa sendiri sangatlah besar khususnya di Denpasar Selatan, ditambah dengan dukungan Organisasi Masyarakat yang bernama Banteng Ambengan Pesanggaran atau yang disingkat dengan Bantas. Bantas ini sendiri berada di desa pedungan yang merupakan gabungan dari 2 banjar. Bantas ini sendiri telah mendukung Kadek Agus Arya wibawa sebagai kekuatan non partai dalam berbagai hal baik pada pemilihan baik Pemilu maupun pada Pilwali 2020 ini maupun dala hal lain yang mampu menaikkan pamor Kadek Agus Arya Wibawa. Ditambah dengan antusias masyarakat dengan mengetahui adanya Calon Wakil Walikota yang berasal

dari Denpasar Selatan, menjadikan Denpasar Selatan sebagai basis massa yang besar dan sangat sulit untuk dimasuki partai lain.

Sedangkan I Gusti Ngurah Jaya Negara juga memiliki massa yang besar di Denpsar Timur. Berbekal jabatan sebelumnya sebagai Wakil Walikota Denpasar menemani I.B Rai Dharmawijaya Mantra sebagai Walikota Denpasar menjadikan nama I Gusti Ngurah Jaya Negara dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Denpasar. Ditambah dengan kinerjanya yang sangat baik pada saat menjabat sebagai Wakil Walikota menjadikan I Gusti Ngurah Jaya Negara memperoleh kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi dan juga antusias masyarakat yang sangat besar karena mengetahui bahwa Calon Walikota berasal dari Denpasar Timur. Karena itulah Denpasar Timur menjadi basis masa yang cukup besar.

Berdasarkan analisis dengan Teori Partai Dominan dari Giovanni Sartori (2005) PDI-P mengusung pasangan calon I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa dikarenakan faktor wilayah basis massa. Dengan diusungnya kedua kader yang berasal dari 2 kecamatan yang berbeda menjadikan PDI-P memperoleh peluang yang sangat besar untuk memenangkan Pilkada 2020 khususnya di Kota Denpasar. Penggabungan 2 wilayah yakni Denpasar Timur dan Denpasar Selatan menjadikan PDI-P sebagai partai yang mendominasi pada Pilkada 2020 di Denpasar.

5. KESIMPULAN

Pilkada serentak 2020 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini merupakan keputusan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Bawaslu RI, KPU RI serta DKPP RI. Dalam pelaksanaan Pilkada ini seluruh partai politik mulai mempersiapkan strategi dan kader-kader terbaik untuk diusung dalam Pemilihan. PDI-P merupakan salah satu partai politik yang mengusung kader-kadernya di seluruh daerah pemilihan salah satunya adalah Kota Denpasar. Dalam pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Denpasar, terdapat banyak pertimbangan yang dilakukan PDI-P dalam memilih kader-kadernya. Pertimbangan PDI-P dalam menentukan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ini dianalisis menggunakan dua teori yakni teori *Rational Choice* yang sempat dikembangkan oleh Barbara Geddes (1996), dan teori Partai Dominan oleh Giovanni Sartori (2005).

Teori *Rational Choice* Barbara Geddes (1996) menganalisis pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI-P. Berdasarkan analisa dengan Teori *Rational Choice*, pola rekrutmen dalam penentuan Calon Wakil ini mengacu pada *partisanship* yang dimana pada akhirnya faktor terpilihnya Kadek Agus Arya Wibawa adalah loyalitas dan massa yang dimiliki oleh Kadek Agus Arya Wibawa. Pertimbangan ini tentunya dipikirkan oleh PDI-P karena selain untuk memperoleh kemenangan pada Pilwali 2020 tentunya juga

ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh partai. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah massa yang dimiliki oleh Kadek Agus tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi PDI-P. hal ini sesuai dengan konsep *Partisanship* yang menjelaskan mengenai rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan.

Teori Partai Dominan dari Giovanni Sartori (2005) digunakan untuk menganalisis wilayah basis massa. Yang dimaksud wilayah basis massa dalam penelitian ini adalah pertimbangan PDI-P dalam penentuan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilatar belakangi faktor kewilayahan. Berdasarkan analisa dengan Teori Partai Dominan dari Giovanni Sartori (2005) PDI-P mengusung pasangan calon I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa dikarenakan faktor wilayah basis massa. Dengan diusungnya kedua kader yang berasal dari 2 kecamatan yang berbeda menjadikan PDI-P memperoleh peluang yang sangat besar untuk memenangkan Pilkada 2020 khususnya di Kota Denpasar. Pengabungan 2 wilayah yakni Denpasar Timur dan Denpasar Selatan menjadikan PDI-P sebagai partai yang mendominasi pada Pilkada 2020 di Denpasar. Berdasarkan analisa dengan teori partai dominan, teori ini mampu menjelaskan pertimbangan PDI-P dari basis kewilayahan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Badudu., J. S. & Zain., S. M. (1994) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geddes, B. (1996). *Politician's Dilemma : Building state capacity in Latin America*. University of California Press.
- katz, R. S., & Crotty, W. (2014) *handbook partai politik*. Yogyakarta : Nusamedia.
- Marijan, K. (2015). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muluk, H. (2010). *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*. Jakarta : Raja Wali Pres.
- Moleong, M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Sartori, G. (2005). *Parties and party systems: A framework for analysis*. ECPR Press.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharizal, (2011). *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Artikel Ilmiah, Jurnal, Skripsi, Tesis

- Badriyani, F. (2018). *Analisis pertimbangan Partai Politik dalam penentuan bakal Calon Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)*.
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). *Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015*. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205-237.
- Firmansyah, J., & Susiatiningsih, H. (2014). *Analisis Kemenangan Ahmad Heryawan Dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2013*. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 46-60.
- Irvan, A. (2019). *Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- Nugroho, H. (2012). *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- Mahadewi, I. A. M., Erawan, K. P., & Noak, A. (2017). *Dominasi Peran Puri Dalam Kontestasi Politik di Bali (Studi Kasus:*

Puri Agung Denpasar). Skripsi (Bali: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2017).

Rozali, I. (2016). *Pola penetapan Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Sibagariang, D., Erawan, K. P., & Azhar, M. A. (2019). *Pola rekrutmen PDIP, Nasdem dan PSI dalam pemilihan Caleg DPRD di Kota Denpasar*.

Wardhana, A. (2017). *Analisis pertimbangan Partai Politik dalam penentuan bakal Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus terhadap Partai Politik di Kota Yogyakarta)*

Artikel Online, Website

KPU. (2016). *pengertian, fungsi, dan system pemilihan umum*. Diambil kembali dari KPU : <https://jdih.kpu.go.id/countkepku5664546b5277253344253344>

NN. (2019) *Mengenal Kadek Agus Arya Wibawa Anak dokter, anggota dewan empat periode, suara tertinggi*. Diambil kembali dari Bali Express : <https://baliexpress.jawapos.com/politik/06/10/2019/anak-dokter-anggota-dewan-empat-periode-suara-tertinggi/>

NN. (2020). *Pilkada serentak 2020*. Diambil kembali dari NusaBali.com : <https://www.nusabali.com/berita/71985/pilkada-serentak-akhirnya-disepakati-9-desember-2020>

NN. (2021). *Sejarah dan visi, misi PDI Perjuangan*. Diambil kembali dari PDIPerjuangan.id : <https://pdiperjuangan.id/>

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.